



**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suprihartini, S.IP., M.Si  
Jabatan : Deputi Bidang Persidangan

selanjutnya disebut pihak pertama

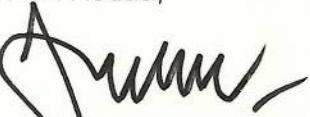
Nama : Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si., M.I.Kom.  
Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

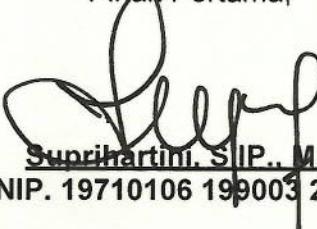
Pihak Kedua,



Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si., M.I.Kom.  
NIP. 19661114 199703 1 001

Jakarta, 8 Agustus 2025

Pihak Pertama,



Suprihartini, S.IP., M.Si  
NIP. 19710106 199003 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. Program Penyelenggaran Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan DPR RI</b>			
1.	Terwujudnya dukungan persidangan, penyusunan, dan pembahasan RUU, baik usul inisiatif DPR RI, maupun usul pemerintah yang disepakati bersama antara DPR RI dan Pemerintah berdasarkan Prolegnas 2025-2029, dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum dan pembangunan nasional	1. Persentase capaian dukungan kinerja pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI  2. Indeks persepsi masyarakat atas kinerja pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI	100%  2,50
2.	Tersedianya dukungan anggaran negara untuk penguatan fondasi transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan tata kelola melalui pengesahan APBN yang berkualitas, akuntabel, dan memiliki indikator result and based (keluaran dan hasil)	1. Persentase capaian dukungan kinerja fungsi anggaran DPR RI  2. Indeks persepsi masyarakat atas kinerja pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI	100%  2,50
3.	Terwujudnya dukungan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan Kebijakan Pemerintah, serta pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan BPK, dan kebijakan lainnya, dlm rangka mendukung akuntabilitas pemerintahan	1. Persentase capaian dukungan kinerja fungsi pengawasan DPR RI  2. Indeks persepsi masyarakat atas kinerja pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI	100%  2,50
4.	Terwujudnya persidangan pembahasan kerjasama antar parlemen dan organisasi internasional dalam rangka mendukung politik luar negeri pemerintah	1. Persentase capaian dukungan kinerja pelaksanaan peran diplomasi parlemen  2. Indeks persepsi masyarakat atas kinerja pelaksanaan peran diplomasi parlemen	100%  2,50
5.	Terwujudnya Persidangan dan pengelolaan aspirasi masyarakat dalam menguatkan fungsi dan peran DPR RI sebagai pilar demokrasi substansial	1. Persentase capaian dukungan kinerja pengelolaan aspirasi masyarakat  2. Indeks persepsi masyarakat atas kinerja pengelolaan aspirasi masyarakat	100%  2,50
6.	Terwujudnya kebijakan tata kelola kelembagaan DPR RI untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI dalam pembangunan nasional	1. Persentase capaian dukungan penyelenggaraan kebijakan tata kelola kelembagaan DPR RI yang berisikan peraturan/keputusan DPR RI, kebijakan kerumahtanggaan DPR RI, atau dokumen kebijakan lainnya yang dimanfaatkan	100%



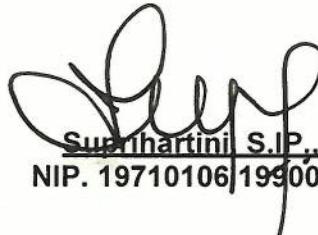
7.	Terwujudnya penanganan perkara etik dan perkara hukum untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI	1. Persentase capaian kinerja peran pengelolaan aspirasi masyarakat	100%
<b>B. Program Dukungan Manajemen</b>			
8.	Terwujudnya layanan persidangan yang profesional dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI yang dimanfaatkan	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas kinerja layanan persidangan	3,75
		2. Persentase capaian kinerja Deputi Bidang Persidangan	100%
9.	Terwujudnya tata kelola kelembagaan sistem pendukung yang berintegritas dan akuntabel untuk fungsi dan peran DPR RI dalam kerangka reformasi birokrasi	1. Nilai monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik	Informatif (98,15)

Program	Anggaran
Satker Dewan	Rp3.874.715.318.000,00
CF. Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	Rp3.874.715.318.000,00
Satker Setjen	Rp229.028.282.000,00
WA. Program Dukungan Manajemen	Rp229.028.282.000,00

Sekretaris Jenderal,

  
Dr. Ir. Indra Iskendar, M.Si., M.I.Kom.  
 NIP. 19661114 199703 1 001

Jakarta, 8 Agustus 2025  
 Deputi Bidang Persidangan,

  
Suprihartini, S.I.P., M.Si  
 NIP. 19710106 199003 2 001

